BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administratif konvensional menuju sistem berbasis integrasi data dan autentikasi elektronik. Identitas digital diposisikan sebagai fondasi utama interoperabilitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Sistem digital IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi identitas, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang membentuk relasi antara negara dan warga negara dalam ekosistem pemerintahan digital (Whitley & Hosein, (2022).

Seiring dengan perkembangan tersebut, konsep *digital inclusion* menjadi isu sentral dalam transformasi digital pemerintahan. *Digital inclusion* tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi tetapi juga mencakup aspek keterampilan, literasi, serta kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital secara efektif dan aman. Ketimpangan digital bersifat multidimensional, melibatkan faktor sosial, ekonomi dan pendidikan yang memengaruhi partisipasi digital individu (Helsper, 2021).

Di sisi lain, percepatan digitalisasi layanan publik juga membawa risiko *digital divide* yang semakin kompleks. Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan akses perangkat dan jaringan, tetapi juga menyangkut kualitas penggunaan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Robinson et al., (2022) Apabila sistem identitas digital diterapkan tanpa strategi inklusi yang memadai,

kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, atau komunitas di wilayah terpencil berpotensi mengalami eksklusi administratif.

Pada level nasional, kebijakan Identitas Kependudukan Digital merupakan bagian dari agenda transformasi digital administrasi kependudukan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fungsi dari program identitas kependudukan adalah untuk 1). Pembuktian identitas 2). Autentikasi identitas, dan 3). Otorisari identitas (Kemendagri, 2022). Program ini dirancang untuk memperkuat integrasi data kependudukan secara nasional melalui sistem yang terhubung dan terstandar.

Digitalisasi identitas juga diarahkan untuk mengurangi potensi pemalsuan dokumen dan duplikasi data penduduk. Kebijakan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi berbasis elektronik yang menekankan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. IKD menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien (Nurhafiza, 2025). Implementasi nasional tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memegang peran strategis dalam percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital. Besarnya jumlah penduduk berdampak langsung pada tingginya target aktivasi IKD yang harus dicapai setiap kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan transformasi digital melalui koordinasi kebijakan, pendampingan teknis, serta kolaborasi lintas daerah. Integrasi sistem

kependudukan menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi berbasis elektronik di tingkat provinsi.

Dalam konteks literasi digital, Jawa Barat menghadapi tantangan struktural yang serupa dengan banyak provinsi lain di Indonesia. Kesenjangan antara wilayah perkotaan yang relatif maju secara teknologi dan wilayah perdesaan yang terbatas aksesnya masih terlihat jelas. Perbedaan tingkat pendidikan, kepemilikan perangkat digital, serta kualitas jaringan internet memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis aplikasi. Tanpa intervensi yang sistematis, kebijakan digitalisasi berisiko hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu. Kesenjangan digital merupakan tantangan utama dalam transformasi layanan publik di berbagai negara. Ketimpangan akses infrastruktur, literasi digital, dan faktor sosial ekonomi sering menghambat pemerataan manfaat digitalisasi (Liu, Zhou, & Liang, 2025).

Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah heterogen dan kompleks. Wilayahnya mencakup kawasan pegunungan di bagian utara dan tengah, hingga kawasan pesisir selatan yang relatif terpencil. Luas kabupaten cianjur Adalah 3.614,38 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 2.740.930 jiwa, bagian utara kabupaten cianjur membentuk lembah dan jauh lebih padat penduduknya daripada wilayah selatan dengan 68,4% dan di wilayah selatan hanya sekitar 30,0% saja.

Berdasarkan data kependudukan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang telah berusia wajib KTP elektronik atau berusia 17 tahun ke atas mencapai lebih

dari 1,9 juta jiwa dari total populasi sekitar 2,7 juta jiwa. Kelompok ini tersebar tidak merata antarwilayah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025). Kecamatan di wilayah utara seperti Cugenang, Pacet, Sukaresmi, dan Cipanas memiliki konsentrasi penduduk usia produktif dan wajib KTP yang lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan seperti Sukanagara hingga Naringgul. Ketimpangan sebaran ini berdampak langsung pada beban pelayanan administrasi kependudukan, termasuk perekaman dan aktivasi KTP elektronik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan daftar jumlah penduduk kabupaten cianjur berdasarkan kecamatan.

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

WILAYAH	**PENDUDUK (LK)**	**PENDUDUK (PR)**	**PENDUDUK (JML)**
TOTAL	1.397.727	1.343.203	2.740.930
CIANJUR	94.063	93.564	187.627
WARUNGKONDANG	45.334	43.598	88.932
CIBEBER	75.233	73.285	148.518
CILAKU	66.071	65.065	131.136
CIRANJANG	48.328	47.056	95.384
BONJOGPICUNG	46.757	45.747	92.504
KARANGTENGAH	90.125	88.117	178.242
MANDE	46.146	44.118	90.264
SUKALUYU	52.368	50.547	102.915

WILAYAH	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
PACET	62.882	59.717	122.599
CUGENANG	67.143	63.300	130.443
CIKALONGKULON	61.075	58.222	119.297
SUKARESMI	52.977	49.705	102.682
SUKANAGARA	30.718	29.817	60.535
CAMPAKA	39.263	37.236	76.499
TAKOKAK	30.198	29.171	59.369
KADUPANDAK	29.642	28.597	58.239
PAGELARANG	42.738	41.271	84.009
TANGGEUNG	27.517	26.764	54.281
CUBINONG	35.564	34.437	70.001
SINDANGBARANG	32.635	31.876	64.511
AGRABINTA	22.192	21.404	43.596
CIDAUN	40.696	38.426	79.122
NARINGGUL	27.312	25.037	52.349
CAMPAKAMULYA	13.561	12.579	26.140
CIKADU	21.712	20.028	41.740
GEKBRONG	36.022	33.932	69.954
CIPANAS	64.200	59.734	123.934
CIJATI	19.326	19.101	38.427

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

WILAYAH	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
LELES	17.952	16.855	34.807
HAURWANGI	36.661	34.690	71.351
PASIRKUDA	21.316	20.207	41.523

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur 2025

(diolah oleh peneliti)

Tabel tersebut menunujukkan angka distribusi dan jumlah penduduk pada 32 kecamatan di kabupaten cianjur, Variasi jumalah perduduk antar kecamatan mencerminkan perbedaan struktur demografi, pola migrasi, serta karakteristik sosial wilayah. Data ini penting dalam perencanaan pelayanan KTP elektronik dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Kecamatan dengan jumlah wajib KTP besar memerlukan kapasitas layanan dan sumber daya aparatur yang lebih kuat.

Transformasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur mengalami perubahan signifikan sejak diterapkannya aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Implementasi IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memangkas antrean, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mempercepat proses autentikasi data kependudukan secara *real time* (Suwartini, 2025).

Dalam upaya meningkatkan aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Cianjur telah mengembangkan berbagai inovasi layanan yang berorientasi pada perluasan akses masyarakat. Salah satu program yang dijalankan adalah LACAK KTP LAYAK IKD, yaitu layanan khusus aktivasi IKD dan pencetakan KTP yang rutin hadir di ruang publik seperti kegiatan *Car Free Day* (disdukcapilcianjur, 2024). Selain itu, terdapat program DAWALA atau Datang Warga Layani yang menerapkan pola jemput bola ke instansi dan komunitas, termasuk kerja sama dengan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk melihat bagaimana perkembangan aktivasi IKD di Kabupaten Cianjur berikut disajikan table jumlah aktivasi IKD di Kabupaten cianjur:

Tabel 1. 2 Daftar Pengguna IKD Di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Kecamatan

1	**WILAYAH**	**TOTAL**	**NO**	**WILAYAH**	**TOTAL**
1	CIANJUR	14,723	17	KADUPANDAK	862
2	WARUNGKONDANG	4,040	18	PAGELARANG	1,528
3	CIBEBER	4,420	19	TANGGEUNG	2,141
4	CILAKU	6,764	20	CUBINONG	1,283
5	CIRANJANG	4,324	21	SINDANGBARANG	943
6	BONJOGPICUNG	2,982	22	AGRABINTA	1,037
7	KARANGTENGAH	12,621	23	CIDAUN	1,045
8	MANDE	3,900	24	NARINGGUL	1,159

9	SUKALUYU	4,913	25	CAMPAKAMULYA	689
10	PACET	5,734	26	CIKADU	1,275
11	CUGENANG	5,667	27	GEKBRONG	3,310
12	CIKALONGKULON	4,652	28	CIPANAS	5,537
13	SUKARESMI	2,431	29	CIJATI	1,206
14	SUKANAGARA	2,492	30	LELES	834
15	CAMPAKA	1,468	31	HAURWANGI	2,527
16	TAKOKAK	721	32	PASIRKUDA	966
TOTAL		108,194			

Sumber: Renstra 2025-2029 kabupten cianjur

Pola sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil, seperti layanan jemput bola dan edukasi langsung kepada masyarakat, telah menjadi strategi utama dalam mendorong aktivasi IKD. Strategi ini menargetkan sekolah, desa, dan komunitas untuk memperluas jangkauan informasi. Aparatur turun langsung untuk membantu proses instalasi dan aktivasi aplikasi di tempat. Strategi jemput bola terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

Di tingkat desa, pemerintah daerah juga mengembangkan program Pelita atau Pelayanan Langsung di Titik Akses Desa yang membawa layanan administrasi kependudukan langsung ke wilayah pedesaan. Pendekatan ini menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan literasi digital. Selain itu, penyediaan pelayanan di delapan titik kecamatan dilakukan untuk mendesentralisasikan layanan agar lebih dekat dengan warga.

Secara empiris, efektivitas pelayanan IKD di Disdukcapil Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh faktor sosial, teknis, dan institusional yang saling berkaitan. Penelitian Nuraeni & Syahrudin, (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan IKD di Cianjur masih menghadapi tantangan dalam aspek aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi digital. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada kesalahan prosedur registrasi dan kegagalan aktivasi akun.

Dalam konteks yang lebih luas penelitian menekankan bahwa kesenjangan akses infrastruktur digital merupakan faktor utama yang memperlebar jurang inklusi digital dalam pelayanan publik. Artinya, keberhasilan digitalisasi layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur yang mendukungnya (Liu et al., 2025). Ketimpangan infrastruktur telekomunikasi berimplikasi pada variasi tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan IKD.

Selain faktor infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat juga menunjukkan perbedaan antar wilayah dan kelompok sosial. Dalam konteks transformasi layanan kependudukan, kesiapan infrastruktur dan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi IKD secara efektif dan inklusif.

Hambatan selanjutnya dalam implementasi IKD di Cianjur berkaitan dengan literasi digital masyarakat yang belum merata antar wilayah dan kelompok usia. Rendahnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi digital menjadi kendala dalam proses registrasi, verifikasi biometrik, dan aktivasi akun. Syafitri, Nurman, et al., (2025) menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital

masyarakat merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan lebih besar.

Selain literasi digital, kepemilikan *smartphone* yang terbatas pada kelompok tertentu juga menjadi tantangan struktural dalam implementasi IKD. IKD berbasis aplikasi seluler menuntut perangkat yang kompatibel serta sistem operasi yang mendukung pembaruan keamanan. Sebagian masyarakat di wilayah pedesaan atau kelompok ekonomi tertentu belum memiliki akses terhadap perangkat tersebut. Perlu data dan sitasi

Biaya pembelian perangkat dan paket data menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Fenomena ini sejalan dengan temuan Zulmawati & Mubarak, (2025) yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan digital seringkali belum sepenuhnya inklusif terhadap kelompok rentan. Ketimpangan akses perangkat memperlebar jarak antara kelompok masyarakat yang siap digital dan yang belum siap.

Beban kerja aparatur juga meningkat karena harus memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketergantungan pada bantuan petugas menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan aplikasi belum mandiri. Kondisi ini memperlambat target perluasan aktivasi IKD secara merata.

Jika literasi digital tidak ditingkatkan secara sistematis, maka kesenjangan akses layanan akan terus terjadi.

Rendahnya inklusi digital berdampak langsung pada efektivitas pelayanan IKD dan capaian target aktivasi. Ketika sebagian masyarakat tidak mampu mengakses atau memanfaatkan layanan digital, tujuan efisiensi dan pemerataan pelayanan tidak tercapai secara optimal. Kesenjangan ini menciptakan dua kelompok pengguna, yaitu kelompok yang terlayani secara digital dan kelompok yang masih bergantung pada layanan manual.

Transformasi layanan publik berbasis IKD hanya akan efektif apabila didukung oleh strategi peningkatan partisipasi dan akses masyarakat secara inklusif. Tanpa pendekatan inklusi yang terencana, digitalisasi berpotensi memperlebar ketimpangan akses layanan (Hamdiah, 2025). Oleh karena itu, strategi peningkatan inklusi digital menjadi prasyarat dalam memastikan efektivitas kebijakan IKD. Upaya tersebut harus mencakup aspek edukasi, pendampingan, dan perluasan akses teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam konteks organisasi, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur menjadi faktor krusial dalam mendukung implementasi IKD. Aparatur tidak hanya dituntut memahami prosedur teknis aktivasi, tetapi juga mampu memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat.

Strategi komunikasi dan kolaborasi dengan kecamatan maupun desa juga menentukan keberhasilan aktivasi IKD di tingkat akar rumput. Pemerintah

kabupaten tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Kolaborasi lintas level pemerintahan diperlukan untuk memastikan informasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Hidayati, (2021) menunjukkan bahwa adopsi IKD lebih efektif ketika terdapat sinergi antara Disdukcapil dan perangkat pemerintahan lokal dalam proses edukasi masyarakat.

Aparat desa dapat berperan sebagai penghubung informasi sekaligus fasilitator aktivasi. Koordinasi yang terstruktur mempercepat penyebaran informasi dan meminimalkan kesalahpahaman. Tanpa kolaborasi yang kuat, sosialisasi cenderung tidak merata dan kurang terarah. Oleh sebab itu, strategi peningkatan inklusi digital perlu menempatkan kolaborasi sebagai instrumen utama dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Cianjur.

Transformasi digital birokrasi harus berlandaskan prinsip keadilan dan inklusivitas agar tidak memperlebar kesenjangan sosial (Mufliha, Dida, & Rodiah, 2026). Dengan demikian, persoalan implementasi IKD bukan hanya isu teknis administratif, melainkan juga isu sosial yang berkaitan dengan pemerataan akses dan keadilan layanan publik.

Meskipun penelitian mengenai IKD telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar studi sebelumnya bersifat evaluatif terhadap implementasi kebijakan dan capaian program. Rahmawati et al., (2026) dan Syafitri, Annisa, et al., (2025) lebih menekankan aspek implementasi dan kesiapan sumber daya, termasuk literasi digital serta kapasitas aparatur.

Fokus penelitian tersebut belum secara mendalam merumuskan strategi peningkatan inklusi digital berbasis konteks lokal kabupaten. Sebagian besar kajian berhenti pada identifikasi hambatan dan faktor pendukung tanpa menawarkan model strategis yang aplikatif. Padahal, dinamika sosial dan karakteristik wilayah sangat memengaruhi efektivitas implementasi IKD. Perbedaan kondisi antar daerah menuntut pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Keterbatasan ini membuka ruang penelitian yang lebih eksploratif untuk menggali strategi berbasis realitas lokal.

Selain itu, kajian yang secara spesifik merumuskan strategi aplikatif peningkatan inklusi digital pada level kabupaten masih terbatas dalam literatur administrasi publik. Ardianti & Pradana, (2025) menyoroti strategi jemput bola sebagai pendekatan peningkatan aktivasi, namun belum mengintegrasikannya dengan kerangka inklusi digital yang komprehensif. Strategi tersebut belum dianalisis dalam kaitannya dengan aspek akses perangkat, literasi digital, infrastruktur, serta kolaborasi kelembagaan secara terpadu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Identitas Kependudukan Digital Berbasis Inklusi Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan, analisis strategi yang telah diterapkan, analisis hambatan yang hadapi serta perumusan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur *e-government* yang menempatkan inklusi digital sebagai variabel strategis.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Strategi yang dirumuskan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap layanan IKD. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang sistematis dan berbasis temuan lapangan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik digital yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur.

B. Identifikasi Masalah

Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur telah berjalan sebagai bagian dari agenda transformasi layanan administrasi kependudukan. Secara administratif kebijakan telah diterapkan melalui aktivasi aplikasi dan berbagai inovasi pelayanan, strategi yang dijalankan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet, serta kondisi geografis wilayah yang beragam memengaruhi capaian aktivasi dan pemanfaatan IKD.

Jika implementasi identitas kependudukan digital berbasis inklusi digital tidak dianalisis secara komprehensif, maka potensi kesenjangan akses layanan dapat semakin melebar. Masyarakat yang memiliki kemampuan dan akses teknologi akan lebih mudah memanfaatkan layanan, sementara kelompok yang terbatas secara digital berisiko tertinggal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi

kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi berbasis digital.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi kebijakan dalam strategi peningkatan inklusi digital pada implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam mendukung strategi peningkatan inklusi digital pada implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis komunikasi kebijakan dalam strategi peningkatan inklusi digital pada implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis ketersediaan sumber daya dalam mendukung strategi peningkatan inklusi digital pada implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur.
3. Menganalisis disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Menganalisis struktur birokrasi dalam mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur administrasi publik, khususnya dalam kajian *e-government* dan inklusi digital pada level pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh strategi sosial dan kelembagaan yang inklusif.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas konsep *digital inclusion* dengan pendekatan kontekstual berbasis karakteristik lokal. Selain itu, kajian ini dapat menjadi referensi konseptual dalam pengembangan model strategi pelayanan publik digital yang adaptif di daerah dengan tingkat kesiapan digital yang beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan dasar evaluasi berbasis data terhadap strategi yang sudah dijalankan.
b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pola sosialisasi, pelayanan dan aktivasi IKD.
c. Memberikan rekomendasi strategis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan aktivasi dan pemanfaatan IKD.

d. Membantu aparatur dalam merancang pola sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih efektif.
e. Mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi dengan kecamatan dan desa untuk memperluas jangkauan layanan digital.
f. Menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi identitas digital.

F. Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Edward III, 1980) menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut berperan dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pelayanan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun demikian, perubahan tersebut tidak secara otomatis menjamin pemerataan akses dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, *Digital Inclusion Theory* menjelaskan bahwa keberhasilan layanan berbasis digital sangat

dipengaruhi oleh tingkat akses, keterampilan, pola penggunaan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut, Helsper (2021).

Berdasarkan keterkaitan antara fenomena kesenjangan inklusi digital, implementasi kebijakan publik, serta strategi organisasi pemerintah, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana strategi peningkatan inklusi digital dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cianjur. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman, persepsi, serta praktik yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan layanan IKD.

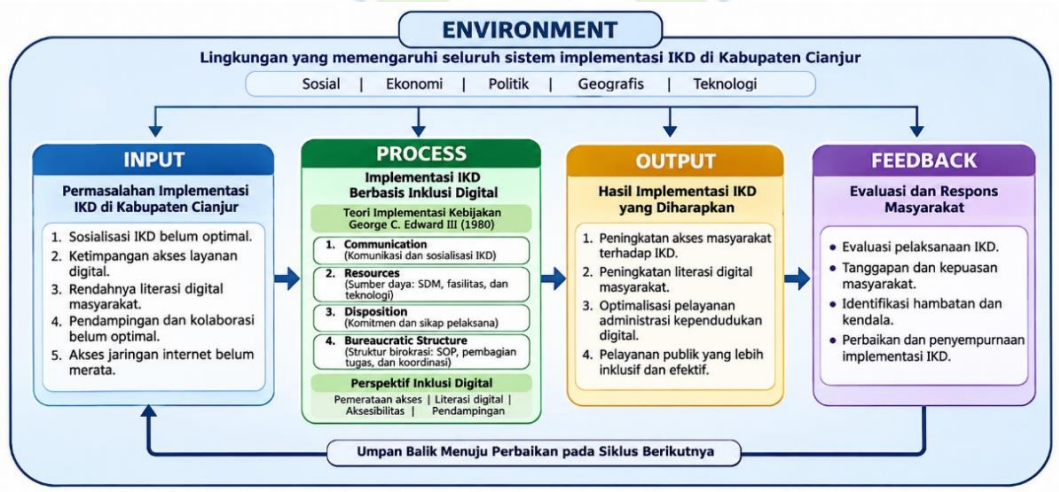

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah oleh peneliti

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara permasalahan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisis strategi peningkatan inklusi

digital di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya kesenjangan akses terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, akses perangkat teknologi, serta kesiapan organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan digital.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian juga menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, (1980) yang menekankan empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana kebijakan IKD dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan inklusi digital masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG